USAID
DARI RAKYAT AMERIKA

LGSP
GOVERNMENT • COMMUNITY • CITIZENS
LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM

Seri Perencanaan Partisipatif

# Prakarsa Kepemerintahan yang Baik dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

**Bahan Bacaan dan Pendampingan**

Local Governance Support Program

# Prakarsa Kepemerintahan yang baik dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

**(September 2005 – May 2007)**

# Good Local Governance Practices in regional development planning preparation process

**Penjelasan berikut ini memberikan illustrasi tentang berbagai prakarsa kepemerintahan yang baik, terutama pendekatan perencanaan partisipatif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan berbagai rencana pembangunan daerah. Ini menunjukkan terdapatnya komitmen yang kuat di daerah untuk melakukan perubahan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penjelasan ini juga ditujukan untuk memperlihatkan ruang lingkup dampak dari bantuan teknis LGSP USAID pada perbaikan proses penyusunan rencana di semua daerah.**

---

**The following description illustrates wide range of good local governance initiatives, particularly the participatory planning approaches that have been undertaken by local governments, DPRD and civil society organizations in different types of local planning preparation process. This demonstrates the strong political will and commitment from the top management and staff of local governments, DPRD and civil society organizations to initiate reforms in local planning and budgeting process to ensure the effectiveness of planning in meeting stakeholders needs and aspirations. This also attempts to show the magnitude of impact on planning process improvements across regions as result of the LGSP technical assistance to date.**

## Daftar Isi:


| | Halaman |
|---|---|
| **Daftar Peristilahan dan Singkatan** | **2 - 4** |
| **Nanggroe Aceh Darussalam** | **5 - 10** |
| **Sumatera Utara** | **10 - 12** |
| **Sumatera Barat** | **13 - 16** |
| **Jawa Barat** | **17 - 19** |
| **Jawa Tengah** | **20 - 21** |
| **Jawa Timur** | **22 - 23** |
| **Sulawesi Selatan** | **24 – 26** |
| **Lampiran 1: Klinik Konsultasi Teknik Perencanaan dan Penganggaran Daerah** | |
| **Lampiran 2: Contoh Pelaksanaan Forum SKPD Pendidikan** | |

## Daftar Peristilahan dan Singkatan

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.

2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.

4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.

6) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan SKPD

9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

12) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.

13) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.

14) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

15) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

16) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

17) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

18) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

19) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (*strategic goals*) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program.

20) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

21) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

22) Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

23) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

24) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

25) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

26) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

27) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

28) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

29) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

30) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

31) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/pelaksanaan pembangunan.

32) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka mendiskusikan dan memahami issue dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.

33) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

34) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

35) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.

36) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization atau Organisasi Masyarakat Sipil.

## Nanggroe Aceh Darussalam

1 RPJPD **Kota Banda Aceh**

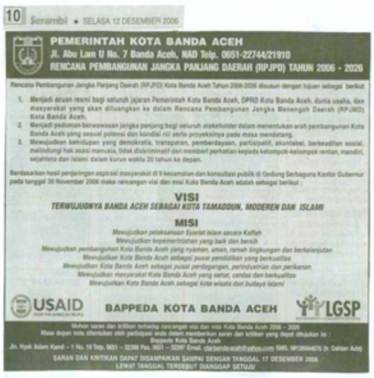

10 Serambi • SELASA 12 DESEMBER 2006

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
Jl. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh, NAD Telp. 0651-22744/21910
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2006 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2006-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut

1. Menjadi acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh, DPRD Kota Banda Aceh, dunia usaha, dan masyarakat yang akan dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh.
2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh stakeholder dalam menentukan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang sesuai potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang.
3. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, pemberdayaan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, tidak diskriminatif dan memberi perhatian kepada kelompok-kelompok rentan, mandiri, sejahtera dan Islami dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di 9 kecamatan dan konsultasi publik di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur pada tanggal 30 November 2006 maka rancangan visi dan misi Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

VISI
TERWUJUDNYA BANDA ACEH SEBAGAI KOTA TAMADDUN, MODEREN DAN ISLAMI

MISI
Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah
Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih
Mewujudkan pembangunan Kota Banda Aceh yang nyaman, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan
Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat pendidikan yang berkualitas
Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, perindustrian dan perikanan
Mewujudkan masyarakat Kota Banda Aceh yang sehat, cerdas dan berkualitas
Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota wisata dan budaya Islami

USAID BAPPEDA KOTA BANDA ACEH LGSP

Mohon saran dan kritikan terhadap rancangan visi dan misi Kota Banda Aceh 2006 – 2026
Masa depan kota ditentukan oleh partisipasi anda dalam memberikan saran dan kritikan yang dapat ditujukan ke :
Bappeda Kota Banda Aceh

SARAN DAN KRITIKAN DAPAT DISAMPAIKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 17 DESEMBER 2006
LEWAT TANGGAL TERSEBUT DIANGGAP SETUJU

Pelibatan organisasi masyarakat sipil dan media secara luas dalam penjaringan aspirasi untuk perumusan isu strategis, visi, misi dan agenda pembangunan jangka panjang daerah. Penjaringan aspirasi dilakukan melalui Pooling Pendapat masyarakat Kota Banda Aceh tentang fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dinilai perlu ditingkatkan pelayanannya dalam kurun waktu rencana 20 tahun.

Melibatkan 4(empat) calon Kepala Daerah dalam pembahasan visi, misi dan agenda pembangunan daerah jangka panjang. Rumusan visi, misi pembangunan daerah dipublikasikan secara luas di media lokal untuk mendapatkan komentar dan tanggapan masyarakat.

2 RPJMD **Kabupaten Nagan Raya**

Pasca terpilih dan dilantiknya Bupati definitif pada awal April 2007, **KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN dan PENGANGGARAN** yang berada dibawah koordinasi Bappeda, menjadi wadah dan media untuk berdiskusi dan melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan proses penyusunan dokumen **RPJMD** Kabupaten Nagan Raya.

Untuk proses penyusunan selanjutnya, Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran ini diharapkan akan menjadi tempat untuk melakukan pertemuan dan pembahasan Tim Penyusun serta media koordinasi antar SKPD dalam menjabarkan Visi dan Misi Bupati terpilih dalam proses penyusunan Dokumen **RPJMD**

Dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik, Bupati dan Wakil Bupati terpilih melakukan rapat rutin sekali seminggu, setiap hari Jumat. Hal ini ditujukan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan merumuskan solusi bersama untuk menjadi agenda

kerja minggu berikutnya. Selain itu, pertemuan ini juga berfungsi sebagai media evaluasi kinerja staf Pemerintah Daerah.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | RPJMD | **Kabupaten Aceh Jaya** | CSO memfasilitasi Bappeda sebagai koordinator Tim Penyusun RPJMD melalui Konsultasi Publik dengan melakukan Workshop dan FGD untuk merevisi draft Dokumen RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda.<br><br>Tujuan workshop ini adalah untuk mendapatkan masukan dan input dari seluruh SKPD, DPRD, CSO, dan Stakeholder terkait lainnya dalam rangka mempertajam kerangka kebijakan dan anggaran serta substansi dan materi program prioritas yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD 2007-2011. |
| 4 | RKPD | **Kab. Aceh Besar**<br><br> | Dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Musrenbang RKPD, Pemerintah Daerah memberikan akses lebih besar kepada perwakilan CSO secara luas untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di musrenbang. |
| 5 | RKPD | **Kab. Nagan Raya**<br><br> | Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan **Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran** untuk tahun 2008 dimulai dengan melakukan kegiatan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.<br><br>Dalam proses Musrenbang Kabupaten, peserta yang dilibatkan meliputi NGO/INGO, UN-Agency, Lembaga Donor, LSM dan CSO yang bekerja dan memiliki program dan kegiatan di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini dilakukan agar tercipta proses yang sinergi dalam upaya efektifitas, sinkronisasi, dan tidak tumpang tindihnya program kegiatan yang akan diusulkan dalam RKPD 2008.<br><br>Pra dan Pasca Musrenbang Kabupaten, dilakukan koordinasi lintas sektoral melalui forum-forum atau diskusi disetiap bidang antar SKPD dengan melibatkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | stakeholder terkait untuk membahas usulan yang berasal Musrenbang Kecamatan dengan tujuan mewujudkan sinergi antar program dan kegiatan yang direncanakan. |
| 6 | Renja SKPD dan RKPD | **Kota Banda Aceh** | Untuk pertama kalinya Musrenbang dimulai dari Gampong dan Kecamatan dengan melibatkan non government stakeholders secara luas.<br><br>Untuk mengefektifkan pelaksanaan Musrenbang di tingkat Desa/Gampong, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Rp. 50 juta untuk setiap Desa/Gampong yang peruntukannya ditentukan sepenuhnya oleh Desa/Gampong<br><br>Bappeda menyusun Kalendar Perencanaan dan Penganggaran untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008<br><br>Keterlibatan DPRD dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran meningkat secara signifikan<br><br>Penggunaan fasilitator independen yang *qualified* dan kompeten untuk memandu jalannya pelaksanaan Musrenbang di tingkat kecamatan dan kota.<br><br>Pengembangan FORUM LINTAS SKPD EKONOMI (SKPD Perindag, Perhubungan, Pertanian Kelautan dan Perikanan, Usaha Kecil Menengah, Dinas Pasar) untuk memadukan dan lebih mengefektifkan berbagai program dan kegiatan sektor ekonomi yang diusulkan oleh Kecamatan dan SKPD. |
| | | <br>Suasana Musrenbang Kecamatan | |
| | | | |
| | | | |
| 7 | Renja SKPD dan RKPD | **Kab. Aceh Barat** | Penyampaian informasi tentang pagu anggaran indikatif pada pelaksanaan Musrenbang sehingga organisasi masyarakat sipil dapat mengajukan usulan program dan kegiatan yang lebih realistis.<br><br>Dalam proses Musrenbang Kecamatan, Bappeda memanfaatkan keahlian (expertise) NGO/INGO, UN-Agency, Lembaga Donor, dan LSM untuk membantu TIM PEMANDU sebagai fasilitator dalam rangka singkronisasi dan memverifikasi program dan kegiatan |
| | | <br>Sinkronisasi Renja-SKPD dan RKPD dengan melibatkan DPRD, NGO/INGO, UN-Agency, Lembaga Donor dan LSM | |

usulan kecamatan untuk diajukan ke Musrenbang tingkat Kabupaten. Pelibatan ini diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui dana APBD dengan program dan kegiatan yang ada dan telah menjadi komitmen NGO/INGO dan lembaga donor di kecamatan tersebut.

Proses ToT teknik Musrenbang dan Penyusunan APBG di Kabupaten Aceh Barat

Bappeda dalam proses Penyusunan Renja-SKPD dan RKPD melibatkan penuh NGO/INGO, UN-Agency, Lembaga Donor, dan LSM dalam proses diskusi dan koordinasi dengan bidang SKPD terkait dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan dan mendiskusikan program dan kegiatan yang direncanakan.

Dalam proses pelibatan ini terjadi "sinkronisasi" antara program dan kegiatan yang direncanakan oleh NGO/INGO, UN-Agency, Lembaga Donor, dan LSM dalam rangka proses percepatan proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat pasca Tsunami dengan Pemerintah Daerah.

Bappeda menyelenggarakan pelatihan Tenaga Perencana Tingkat Kecamatan untuk memperkuat kapasitas fasilitator perencanaan tingkat kecamatan.

8 Renja SKPD dan RKPD

**Kabupaten Aceh Jaya**

Fasilitasi Singkronisasi RKPD Kab. Aceh Jaya dengan Program Kerja DIPA-2007 BRR NAD-Nias

Bappeda menggunakan fasilitator independen untuk memfasilitasi sinkronisasi Renja-SKPD untuk penyusunan RKPD di Kabupaten Aceh Jaya dalam rangka proses persiapan dalam penyusunan KUA dan PPAS.

Bersamaan dengan itu, melakukan *technical advisory* dengan memfasilitasi proses sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan rencana program dan kegiatan NGO/INGO, UN-Agency, Lembaga Donor dan LSM yang berkerja di Kabupaten Aceh Jaya.

Selain itu, bersama dengan CSO memfasilitasi proses sinkronisasi dan sinerginya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dianggarkan dalam APBD dengan Program dan Kegiatan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-

Nias yang tertuang dalam DIPA-2007.

Peserta dari dinas Kesehatan sedang mereview Draft Final Renja SKPD terkait dalam kegiatan workshop review draft Final Renja-SKPD Kab.Aceh Jaya

Selanjutnya, dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas tentang proses perencanaan dan penganggaran pemerintah mukim dan gampong di Aceh Jaya, BPMD mengadakan, ToT untuk 172 *keuchik* dan 21 *imum mukim* di Aceh Jaya. Penguatan ini bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman kepada aparat *gampong* dan *mukim* dalam rangka menciptakan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran baik di tingkat *gampong* sampai dengan di tingkat Kabupaten.

Simulasi Para peserta dalam ToT teknik Musrenbang dan Penyusunan APBD di Kabupaten Aceh Jaya

9 Renja SKPD **Kabupaten Aceh Besar**

Pengembangan Forum Multi Stakeholders SKPD Pendidikan dengan melibatkan lembaga donor internasional seperti DBE, PLAN INTERNATIONAL, ERA, ISLAMIC RELIEF dan BRR telah sangat membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan program dan kegiatan sektor pendidikan yang lebih terpadu dan efisien

Menyusun PERDA KECAMATAN untuk memastikan penyusunan Renja dan Renstra KECAMATAN yang lebih partisipatif

10 Renja SKPD **Kabupaten Nagan Raya**

Lounching Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Nagan Raya, penyerahan secara simbolis dari Ketua DPRD Kepada Kepala Bappeda Kab. Nagan Raya

Pengembangan **KLINIK KONSULTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM RANGKA PERCEPATAN APBD 2007** yang dikoordinasikan oleh Bappeda dan didukung oleh LGSP telah sangat membantu SKPD dalam proses penyusunan Renja dan RKA SKPD dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan percepatan waktu penyusunan RAPBD 2007 sehingga APBD dapat disyahkan dalam waktu yang lebih cepat.

Klinik ditujukan untuk mendisiplinkan implementasi Kalendar Perencanaan dan Penganggaran yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif

yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dalam rangka percepatan APBD 2007.

Klinik Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran: Workshop Review Draft Final Renja-SKPD Kab Nagan Raya 2007

Melakukan evaluasi yang menyeluruh atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun lampau dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2007.

Pengembangan Forum SKPD Pendidikan dengan melibatkan lembaga donor/keuangan internasional seperti UNORC, UNICEF, MERCY CORPS, IFRC untuk mensinkronisasikan program dan kegiatan non APBD dan APBD dan menghasilkan program yang lebih efektif melayani masyarakat.

Pasca disahkannya APBD 2007, melakukan diskusi publik APBD 2007 dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi APBD 2007 kepada Masyarakat, CSO dan DPRD.

## Sumatra Utara

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | RPJMD | **Kabupaten Karo**<br> | Terkait penyusunan RPJMD Kabupaten Karo, Bappeda sebagai organisasi utama penyusun dokumen tersebut, telah melibatkan multi stakeholder Kab Karo dalam perumusan isu strategis daerah melalui konsultasi publik. Identifikasi, prioritisasi, dan penyepakatan isu strategis menerapkan metoda **Technology of Participation (TOP)**. |
| 2 | Renstra SKPD | **Kabupaten Karo** | SKPD Pertanian dan SKPD Pendidikan telah menggelar Konsultasi Publik untuk merumuskan isu prioritas masing-masing SKPD. Proses identifikasi, prioritisasi, dan penyepakatan isu strategis dilakukan dengan menerapkan metoda **Technology of Participation (TOP)**. |
| 3 | Renstra SKPD | **Kota Tebing Tinggi** | Dalam rangka sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD, khususnya untuk menjamin terarahnya kegiatan seluruh SKPD dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan dalam RPJMD, Bappeda menyelenggarakan *On Job* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | *Training* tentang Evaluasi Renstra SKPD.<br><br>Materi pelatihan mencakup Review RPJMD dan RTRW Kota Tebing Tinggi, Standar Pelayanan Minimal, Latihan Penyusunan Profil SKPD, Latihan Penyusunan Visi, Misi, dan Konsultasi Publik tentang Visi, Misi, dan Profil SKPD. |
| | | | Melalui kegiatan ini, seluruh SKPD diberikan pemahaman yang lebih baik tentang rumusan Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Capaian Pembangunan Jangka Menengah.<br><br>Melalui latihan penyusunan profil SKPD diharapkan seluruh SKPD dapat menyusun profil sesuai dengan Tupoksi, Urusan Wajib/Pilihan yang menjadi urusannya, serta sesuai dengan Isu Strategis dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan (secara nasional atau capaian pada RPJMD).<br><br>Bappeda juga melakukan pelatihan konsultasi publik yang diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas keterlibatan stakeholder sejak tahap awal perencanaan (visi misi dan profil SKPD) |
| 4 | Renja SKPD | **Kabupaten Serdang Bedagai** | Untuk meningkatkan kualitas substansi dan proses penyusunan Renja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Bappeda menyelenggarakan Training Workshop penyusunan Renja SKPD. Training Workshop memperkenalkan format Permendagri 13/2006, khususnya terkait penyusunan program dan kegiatan.<br><br>Penggunakan format PERMENDAGRI 13/2006 ditujukan untuk menseleksi, memproses, memprioritaskan dan menyepakati usulan program dan kegiatan di semua peringkat Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan kabupaten. Ini untuk kepentingan efisiensi dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan di peringkat SKPD dalam Forum SKPD. |
| 5 | Renja SKPD | **Kab Deli Serdang** | DPRD terlibat aktif dalam menilai, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | memantau, dan mengevaluasi proses penyusunan Renja DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan DPRD. |
| 6 | RKPD | **Kabupaten Simalungun** | Menyadari adanya permasalahan keterlambatan pelaksanaan Musrenbang serta apatisme di kalangan masyarakat karena seringkali usulan masyarakat hasil Musrenbang tidak direalisasikan pada tahun anggaran yang direncanakan, Pemda Kab. Simalungun melakukan beberapa perbaikan penyelenggaraan Musrenbang, seperti:<br>a) Menetapkan SK Bupati/Perda tentang kalender perencanaan dan penganggaran daerah, dengan penekanan bahwa Musrenbang sebagai wadah utama penampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah<br>b) Menetapkan Pagu Anggaran Indikatif sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, sehingga SKPD dapat menetapkan program/kegiatan mana saja yang akan diusulkan sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.<br>c) Memfasilitasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)-stakeholder SKPD dalam menyusun rencana tindak, sebagai pegangan OMS dalam menyepakati prioritas program/kegiatan pada forum SKPD<br>d) Memfasilitasi DPRD dalam menyusun rencana kerja pada tupoksi penganggaran, sehingga kegiatan Musrenbang dapat menjadi bagian dari proses Jaring Aspirasi Masyarakat (RESES DPRD) dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai dasar penyepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)<br>e) Membatasi usulan masyarakat kepada SKPD (peningkatan keswadayaan), penganekaragaman usulan masyarakat (9 fungsi pemerintahan), pelibatan SKPD dan DPRD sejak Musrenbang Kecamatan (dalam rangka konfirmasi dan verifikasi), penggunaan Format Permendagri 13 sebagai Media Forum SKPD, serta arahan penentuan prioritas pembangunan daerah dalam rangka Musrenbangda. |

## Sumatra Barat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | RPJPD | **Kota Padang Panjang** | Pemerintah daerah mengundang Bappenas untuk berkontribusi dalam Workshop Orientasi Penyusunan RPJPD, terutama berkaitan isu dan kebijakan pembangunan nasional yang perlu diakomodasikan dalam penyusunan RPJPD |
| 2 | RPJPD | **Kab. Padang Pariaman** | Pemerintah Daerah melaksanakan Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga kecamatan dan nagari, sebagai langkah mencari bentuk dan tema-tema untuk penentuan dan perumusan VISI-MISI Kabupaten Padang Pariaman. Pemerintah Daerah juga merencanakan Uji Publik RPJPD dengan melibatkan Multi Stakeholders termasuk Para Perantau. |
| 3 | Renstra SKPD | **Kota Bukittinggi**<br> <br>Ekspose Renstra oleh setiap SKPD<br> <br>Konsultasi Publik diikuti oleh seluruh SKPD | Mengadakan **GO PUBLIC RENSTRA SKPD**. Kegiatan konsultasi publik ini ditujukan untuk mengekspose RENSTRA masing-masing SKPD kepada top manajemen dan seluruh staff pemerintah daerah serta organisasi masyarakat sipil dan media untuk mendapatkan komentar dan tanggapan bagi penyempurnaannya. Masing-masing Kepala SKPD memberikan paparan, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan pleno untuk merumuskan kesepakatan. |
| 4 | RKPD | **Kabupaten Tanah Datar** | Pemerintah Daerah mereview dan memutakhirkan Peraturan Bupati 2/2005 tentang mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah dengan tujuan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi keterlibatan publik dalam proses dan pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran daerah.<br><br>Bappeda menyelenggarakan Lokakarya untuk bidang Proses Perencanaan dan Penganggaran di Tingkat Kecamatan dan Nagari. Dengan program ini diharapkan praktik perencanaan partisipatif dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | penganggaran yang transparan bisa dijalankan dengan konsisten. Lebih jauh lagi, perencanaan partisipatif akan meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Selain itu dibicarakan juga bagaimana menguatkan media lokal dan organisasi masyarakat untuk mendorong implementasi Peraturan Bupati No.2 tahun 2005 secara lebih efektif dan pada gilirannya dilembagakan sebagai peraturan daerah tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.<br><br>Menjelang perda ini disahkan, publik, LSM dan stakeholder lain perlu memaksimalkan ruang partisipasi yang sudah ada. Pemerintah daerah juga menyediakan tenaga fasilitator untuk level SKPD.<br><br>Fasilitator/CSO ditugaskan Pemerintah Daerah untuk memberikan penguatan pada SKPD di semua kecamatan dan nagari; advokasi terhadap musrenbang tahun 2007; melaksanakan pelatihan perencanaan dan penganggaran bagi semua kepala urusan satuan kerja Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan pemahaman yang sama di level SKPD tentang proses perencanaan dan penganggaran partisipatif. |
| 5 | RKPD | **Kabupaten Padang Pariaman** | Dalam workshop orientasi penyusunan RKPD, Bappeda melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kab Padang Pariaman, guna memperoleh pemahaman yang sama tentang proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD. Workshop juga menghasilkan rencana tindak lanjut seluruh SKPD terkait proses penyusunan RKPD tersebut. |
| 6 | RKPD | **Kota Bukittinggi** | Pemerintah Daerah melaksanakan lokakarya orientasi Musrenbang bagi staff pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai suatu kegiatan Pra Musrenbang. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang landasan hukum Musrenbang; prosedur dan mekanisme serta kesepakatan Musrenbang agar peserta Musrenbang lebih siap berpartisipasi dan memberikan usulan yang efektif dalam Musrenbang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | RKPD | **Kabupaten Solok** | Pemerintah Daerah melakukan keterpaduan perencanaan dan penganggaran dengan upaya sistematis melalui Pelatihan Proses Perencanaan dan Penganggaran untuk penguatan Musrenbang yang melibatkan komponen stakeholder dalam penyusunan dan penetapannya yang dimulai dari tingkat Nagari.<br><br>Kegiatan ini dilakukan dengan keterpaduan Perencanaan pada level Nagari dan perencanaan di level Kabupaten, dengan membangun komitmen untuk mempromosikan transparansi dan partisipatif dalam perencanaan; mendorong keterlibatan Eksekutif dan Legislatif; memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran, khususnya dalam perencanaan tahunan (Renja SKPD dan RKPD). |
| 8 | RKPD | **Kota Padang Panjang** | Pemerintah Daerah melaksanakan Pelatihan orientasi Musrenbang bagi staff pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai suatu kegiatan PRA MUSRENBANG. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang landasan hukum Musrenbang; prosedur dan mekanisme serta kesepakatan Musrenbang agar peserta Musrenbang lebih siap berpartisipasi dan memberikan usulan yang efektif dalam Musrenbang. |

Sebagai langkah pengawalan yang selama ini dimana program-program dari Level Kecamatan dan Nagari dirasakan kurang terakomodasi, Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang lebih nyata untuk meningkatkan kualitas Musrenbang:

**Langkah konkrit pelembagaan partisipasi dalam Musrenbang dan Konsultasi Publik:**

- ➔ Musrenbang harus dilaksanakan mulai dari tingkat nagari dengan melibatkan semua komponen dan tokoh masyarakat nagari dan perantau.
- ➔ Keberadaan Tenaga Pemandu /

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Fasilitator Tingkat Nagari dan Kecamatan dalam rangka menggali partisipasi masyarakat perlu dilanjutkan dan ditingkatkan keberdayaannya<br>➔ Perencanaan pembangunan yg dibahas pada musrenbang harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<br>➔ Hasil Musrenbang mulai dari tingkat nagari, kecamatan, dan Kabupaten disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat melalui media informasi baik cetak maupun elektronik.<br>➔ Musrenbang Kabupaten harus mengoptimalkan hasil musrenbang tingkat Nagari dan Kecamatan yang telah disinergikan dengan program SKPD terkait melalui forum – forum di tingkat Kabupaten.<br>➔ SKPD dalam menyusun RKPD harus berpedoman dan mengacu kepada hasil musrenbang Kabupaten dan Program yang dianggarkan melalui Pemerintah Propinsi dan Pusat.<br>➔ Mengoptimalkan sosialisasi perda transparansi. |
| | | | Pemerintah Daerah menerbitkan POSTER APBD untuk diseminasikan ke publik secara luas dalam rangka transparansi anggaran APBD. |
| 9 | Renja SKPD | **Kab. Padang Pariaman** | Pemerintah Daerah melaksanakan Workshop untuk review menyeluruh atas proses penyusunan dokumen-dokumen Renja SKPD yang sudah ada untuk memastikan apakah prosesnya sudah memenuhi ketentuan yang ada (pendekatan politis, partisipatif, teknokratis, bottom-up dan top-down) |
| 10 | RKPD, KUA, PPAS, dan APBD | **Kota Solok**<br>**Kab Solok,**<br>**Kota Bukittinggi,**<br>**Kab P. Pariaman,**<br>**Kota P. Panjang,**<br>**Kab. Tanah Datar** | Pemerintah Daerah melakukan Workshop Orientasi Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran sebagai kegiatan pra penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS). Kegiatan ini ditujukan untuk menyamakan sikap dan pandangan yang diperlukan untuk mewujudkan konsistensi perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (KUA dan PPAS dan APBD) |

## Jawa Barat

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | RPJPD | **Kota Bogor** | Dalam rangka penyusunan RPJPD, Bappeda berinisiatif untuk memulai penyusunan rencana tersebut dengan penyusunan profil Kota Bogor.<br><br>Profil Kota Bogor disusun melalui serangkaian FGD dengan melibatkan multi stakeholder (seluruh SKPD dan CSO). Pelibatan multi pihak ini dimaksudkan agar dapat diperoleh gambaran menyeluruh akan kebutuhan dan permasalahan daerah dalam kurun waktu perencanaan.<br><br>Dokumen profil telah disusun dalam waktu empat bulan (2006) dan digunakan untuk arahan perumusan Visi dan Misi Daerah.<br><br>Penyusunan dokumen RPJPD dilakukan melalui serangkaian FGD dengan melibatkan multi stakeholder untuk membahas isu-isu strategis pembangunan. |
| 2 | RPJPD | **Kota Sukabumi** | Terdapat political will dan komitment yang kuat dari Bappeda untuk menyusun RPJPD secara partisipatif<br><br>Kepala Bappeda sangat mendorong aparatnya dalam pelaksanaan serangkaian agenda konsultasi Publik berupa FGD untuk membahas berbagai isu pembangunan yang dihadapi. FGD melibatkan seluruh aparat Bappeda, perwakilan SKPD, dan stakeholder non pemerintah. |
| 3 | RPJPD | **Kota Bandung** | Proses penyusunan RPJP Daerah dimulai dengan melakukan serangkaian forum konsultasi stakeholders untuk merumuskan isu pembangunan kota untuk menghasilkan PROFIL KOTA BANDUNG.<br><br>Melakukan penggalian gagasan melalui survey langsung, jajak pendapat melalui media (cetak dan elektronik). Merumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara partisipatif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil secara luas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Melakukan briefing orientasi bagi TIM PENYUSUN RPJP DAERAH untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam pendekatan dan langkah-langkah penyusunan RPJP Daerah dan agenda konsultasi publik. |
| 4 | RPJPD | **Kabupaten Bandung** | Melaksanakan serangkaian forum konsultasi stakeholder dan survai jajak pendapat masyarakat sebagai langkah awal dalam rangka proses penyusunan RPJP Daerah |
| 5 | RPJMD | **Kabupaten Sukabumi**<br> <br>Musrenbang RPJMD Kab Sukabumi<br> | Bappeda melakukan serangkaian FGD yang intensif dengan stakeholder kunci dalam beberapa kelompok interest sebagai kegiatan PRA Musrenbang RPJMD dalam rangka menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan jangka menengah daerah. |
| 6 | Renstra SKPD | **Kabupaten Sukabumi**<br> <br>Konsultasi Publik Renstra Bappeda | Dalam penyusunan Renstra **Bappeda**, telah dilakukan Konsultasi Publik Rancangan Visi dan Misi Bappeda Kab Sukabumi yang melibatkan seluruh SKPD dan perwakilan CSO. Kegiatan ini menghasilkan penyempurnaan rancangan visi dan misi Bappeda sehingga merespon aspirasi stakeholder Bappeda<br><br>Dalam penyusunan Renstra-nya, **Dinas Pendidikan** telah memperbaiki pendekatan penyusunan sehingga lebih partisipatif. Sedikitnya dilakukan tiga Konsultasi Publik tentang substansi Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Kab Sukabumi. Kegiatan ini menghasilkan penyempurnaan |

Konsultasi Publik Renstra
Dinas Pendidikan

substansi Renstra (visi, misi, evaluasi kinerja, isu strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan) berdasarkan pendapat dan pertimbangan stakeholder Renstra Dinas Pendidikan Kab Sukabumi.

**Dinas Kesehatan** melakukan FGD Rancangan Renstra Dinas Kesehatan dengan melibatkan stakeholder Dinas tersebut.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Renstra dan Renja SKPD | **Kota Tasikmalaya** | SKPD UMKM mengembangkan Forum Stakeholder dengan melibatkan para pelaku ekonomi lokal untuk membantu SKPD dalam mengevaluasi dan menyusun rencana penyusunan Renstra dan Renja SKPD |
| 8 | RIPPDA | **Kota Bandung** | Untuk pertama kalinya mengakomodasikan pendekatan perencanaan partisipatif dengan menggelar konsultasi public melibatkan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan media dalam rangka proses penyusunan dokumen RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah). |
| 9 | Lain-lain | **Provinsi Jawa Barat** | Untuk pertama kalinya PROVINSI membuka ruang keterlibatan publik dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. BAPPEDA menyediakan waktu dan ruang khusus secara berjadwal untuk menerima masyarakat/multi stakeholder yang ingin melakukan konsultasi, FGD atau mendapatkan informasi berkaitan dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu untuk memutakhirkan rencana sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. |

## Jawa Tengah

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renstra SKPD dan Kecamatan | **Kab Boyolali** | Penyelenggaraan KLINIK KONSULTASI TEKNIK PENYUSUNAN RENSTRA SKPD dan KECAMATAN ditujukan untuk:<br>(1) memberikan kesempatan kepada setiap SKPD untuk melakukan konsultasi secara langsung tentang permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam penyusunan RENSTRA SKPD<br>(2) memberikan advis dan bantuan teknis yang lebih terarah bagi tersusunnya dokumen RENSTRA yang lebih baik dan berkualitas meliputi kelengkapan isi dokumen, proses, penjabaran dan ketajaman isi, serta keterkaitannya dengan dokumen rencana lanilla seperti RPJM Daerah. Kegiatan KLINIK dikoordinasikan oleh Bappeda dengan dukungan service providers (LGSP).<br><br>Kegiatan ini dinilai sangat membantu mendisiplinkan SKPD dalam melaksanakan kalendar perencanaan dan penganggaran daerah dan; meningkatkan kualitas dokumen RENSTRA SKPD dan RENSTRA Kecamatan.<br><br>Form Asistensi diterapkan untuk mencatat kemajuan yang dicapai dan butir-butir perbaikan dan penambahan yang masih perlu dilakukan. Form Asistensi ini menjadi pegangan advisor dan SKPD untuk asistensi berikutnya. |
| | | <br>Perwakilan SKPD saat konsultasi tentang kemajuan penyusunan Renstra SKPD | |
| | | <br>Perwakilan SKPD saat konsultasi tentang kemajuan penyusunan Renstra SKPD | |
| 2 | Renstra dan Renja SKPD | **Kabupaten Klaten** | Mengakomodasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa ke dalam Renstra dan Renja SKPD dengan melibatkan stakeholder non pemerintah, termasuk Tim Pakar dari Perguruan Tinggi |
| 3 | Renstra dan Renja SKPD | **Kabupaten Sukoharjo** | Bappeda sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan di daerah telah menyediakan **ruang dan waktu khusus untuk advisory perencanaan** bagi SKPD-SKPD di Kab.Sukoharjo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Renja SKPD dan RKPD | **Kabupaten Sukoharjo**<br> | Melaksanakan lokakarya orientasi Musrenbang bagi staff BAPPEDA dan Kecamatan yang akan bertugas sebagai fasilitator MUSRENBANG. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang landasan hukum Musrenbang; prosedur dan mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan daerah serta pengetahuan dan teknik fasilitasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Musrenbang dan melaksanakan tugas fasilitasi agar lebih efektif.<br><br>Mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal dalam penyusunan RPJM Daerah, RENSTRA SKPD, RKPD dan RENJA SKPD |
| 5 | Renja SKPD | **Kabupaten Kudus** | DPRD terlibat aktif dalam menilai, memantau, dan mengevaluasi proses penyusunan Renja DPRD yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan DPRD. |
| 6 | Renja SKPD | **Kabupaten Boyolali** | Penyelenggaraan KLINIK KONSULTASI TEKNIK PENYUSUNAN RENJA SKPD ditujukan untuk:<br>1) memperkuat fungsi koordinasi Bappeda kepada SKPD-SKPD<br>2) mendorong fungsi koordinasi internal SKPD<br>3) mendorong SKPD untuk lebih serius menangani penyusunan dokumen perencanaan |
| 7 | Kalender Perencanaan Daerah | **Kabupaten Klaten** | Sosialisasi Kalender Perencanaan Daerah kepada Organisasi Masyarakat Sipil.<br><br>Pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dan CSO tentang Proses perencanaan yang harus dilakukan. |

## Jawa Timur

### 1 RPJPD Kota Kediri

**SKENARIO I – BANDAR KERTARAHARJA**
**Kepastian Hukum Konsisten dan Pertumbuhan Ekonomi Dinamis**

| | |
|---|---|
| Sosial | ▪ Tumbuhnya kebersamaan<br>▪ Partisipasi tinggi, masyarakat melakukan kontrol pada penyelenggaraan tata kelola kota<br>▪ SDM berkualitas tinggi, seluruh warga minimal mengenyam pendidikan 9 tahun, bahkan mayoritas berpendidikan tinggi<br>▪ Masyarakat memiliki etos kerja<br>▪ Masyarakat kritis dan cerdas<br>▪ Kenyamanan dalam kehidupan sosial budaya (maju berkelanjutan) |
| Teknologi | ▪ Pemanfatan teknologi ramah lingkungan<br>▪ Teknologi terakses oleh semua penduduk, sehingga arus informasi terdisrtribusi secara merata<br>▪ Teknologi yang tersedia memudahkan proses produksi |
| Ekonomi | ▪ Pertumbuhan ekonomi tinggi<br>▪ Jaminan kesejahteraan (kesehatan dan pendidikan)<br>▪ Angka kemiskinan dan pengangguran rendah<br>▪ Dari tahun ke tahun investasi meningkat<br>▪ Dunia usaha/industri berkembang<br>▪ Masyarakat merasa nyaman, ekonomi mudah dicari, ada jaminan keamanan bagi pelaku ekonomi<br>▪ PAD besar dengan pengembalian kepada penduduk dengan proporsi yang berimbang berupa program yang berkelanjutan |
| Lingkungan | ▪ Adanya mesin pengolah sampah yang dilindungi perda<br>▪ Lingkungan kota bersih<br>▪ Hutan kota terjaga kelestariannya<br>▪ Sungai Brantas dan sumber daya air lainnya terjaga kelestariannya |
| Politik | ▪ Hukum ditegakkan dengan sebenar-benarnya<br>▪ Pemerintah kota sangat peduli dengan memproduksi banyak perda<br>▪ Pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai keinginan masyarakat<br>▪ Masyarakat mulai dapat menterjemahkan demokrasi lewat putusan di tingkat RT/RW<br>▪ Partai berkompetisi secara sehat<br>▪ Birokrasi memberikan pelayanan publik secara profesional. Tiga pilar pemerintahan: eksekutif, legislatif, yudikatif, bekerja secara bahu membahu berlandaskan hukum untuk memberikan pelayanan terbaik |

Contoh Skenario Planning Kota Kediri

Bappeda Kota Kediri dalam penyusunan RPJPD periode 2007 – 2027 menggunakan pendekatan menggali aspirasi dari masyarakat melalui penyebaran questionnaires secara stratified random sampling kepada 1,500 penduduk Kota dan melibatkan stakeholder yang relevan untuk proses perumusan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang kota,

RPJP Daerah menggunakan pendekatan scenario planning (perencanaan berbasis scenario) untuk mengelaborasi alternative strategi pengembangan daerah dalam masa dua puluh tahun kedepan. Penyusunan scenario dilakukan dengan melibatkan secara luas organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan media.

CSO (Perguruan Tinggi, NGO) dilibatkan sebagai fasilitator musrenbang RPJPD untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas hasil Musrenbang dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

### 2 RPJPD Kota Madiun

CSO Kota Madiun memberikan kontribusi terhadap mekanisme penyusunan RPJPD dan optimalisasi isu strategis arah kebijakan pembangunan, program dalam pelibatannya di FGD.

### 3 RPJMD Kabupaten Pacitan

DPRD Kab.Pacitan dan CSO terlibat aktif dalam memberikan kontribusi penilaian, evaluasi, pemuktahiran Dokumen RPJMD, isu strategis, formulasi rancangan awal RPJMD, perumusan program prioritas dan pagu indikatif.

CSO menyampaikan kepada Pemerintah Daerah konsep paper isu pendidikan dan perencanaan partisipatif, sebagai bahan masukan bagi pembahasan penyusunan program RPJMD.

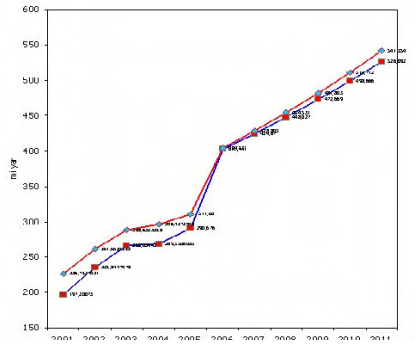

Contoh Hasil Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pacitan

Proyeksi pendapatan
Proyeksi Belanja

Di luar mekanisme Musrenbang RPJMD, perumusan substansi RPJMD dilakukan melalui serangkaian FGD dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.

Keterbukaan Pemda tentang data/informasi keuangan daerah dalam proses penyusunan profil, analisis, dan proyeksi keuangan daerah.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | **RKPD** | **Kabupaten Probolinggo** | Partisipasi aktif perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam konsultasi dalam penyusunan RKPD telah banyak membantu dalam mensinkronisasikan program kabupaten dan program Provinsi.<br><br>Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan konsultasi public RKPD telah melibatkan semua elemen masyarakat yang relevant untuk menghasilkan RKPD yang lebih responsive terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. |
| 5 | **RKPD** | **Kota Batu dan Kabupaten Malang** | Melakukan usaha yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil Musrenbang RKPD. |
| 6 | **RKPD** | **Kota Madiun** | DPRD dengan pendampingan CSO terlibat aktif dalam memberikan penilaian dan evaluasi RKPD sebelum dilanjutkan kepada tahapan perumusan KUA dan PPAS. |

## Sulawesi Selatan

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | RPJPD | **Kabupaten Takalar** | Bappeda menyelenggarakan survey penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi isu strategis, merumuskan tujuan dan agenda pembangunan 20 tahun ke depan.<br><br>Penyebarluasan hasil Musrenbang RPJPD melalui media local untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. |
| | | <br>Suasana Diskusi Perumusan Tujuan dan Agenda Pembangunan RPJPD | |
| 2 | RKPD dan Renja SKPD | **Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Soppeng,** | Pemerintah Daerah melaksanakan Workshop Orientasi Perencanaan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik pada semua SKPD tentang penyusunan RKPD dan Renja SKPD. |
| 3 | RKPD dan Renja SKPD dan Partisipasi Publik | **Kabupaten Jeneponto**<br> | Untuk memudahkan pemahaman SKPD tentang penyusunan RKPD dan Renja SKPD, disepakati menggunakan Renja SKPD Kehutanan, Perkebunan, dan Lingkungan sebagai model untuk SKPD lainnya.<br><br>Bappeda menyusun Kalender Perencanaan dan Penganggaran untuk menjadi panduan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD.<br><br>Anggota DPRD daerah pemilihan dan stakeholder non pemerintah terlibat aktif dalam Musrenbang RKPD.<br><br>Pembentukan Tim Monitoring yang anggotanya terdiri dari SKPD, Setwan DPRD, dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk memantau proses dan kualitas penyelenggaraan partisipasi public, serta merekomendasikan hasil/temuannya.<br><br>Tim Penyusun RKPD menyelenggarakan kegiatan pasca Musrenbang untuk menampung kebutuhan konsultasi SKPD dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan. |
| 4 | RKPD dan Renja SKPD | **Kota Palopo** | Bappeda mengembangkan Model RKPD dan Renja SKPD yang baik untuk dijadikan contoh bagi semua SKPD dalam menyusun Renja SKPD. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | DPRD dan Organisasi Masyarakat Sipil terlibat aktif dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD.<br><br>Pembentukan Forum Multistakeholder SKPD Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membahas isu strategis, perumusan kebijakan, program, dan kegiatan, berkaitan dengan pengembangan UKM "Rumput Laut". |
| 5 | Renja DPRD | **Kabupaten Takalar**<br> 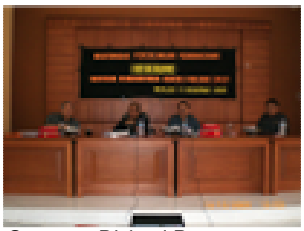 <br>Suasana Diskusi Penyusunan Renja DPRD | DPRD dibantu fasilitator dari organisasi masyarakat sipil/CSO dan tenaga ahli menyusun Renja DPRD. |
| 6 | RKPD dan Renja DPRD | **Kabupaten Gowa**<br> | Pemerintah Daerah membentuk Tim Penyusun RKPD yang anggotanya terdiri dari perwakilan SKPD, tenaga ahli, dan organisasi masyarakat sipil.<br><br>Dokumen RKPD telah mencantumkan secara jelas indicator dan target kinerja keluaran, masukan, hasil, manfaat, dan pagu indikatif, sesuai dengan ketentuan Permendagri 13/2006. |
| 7 | RKPD | **Kabupaten Pangkajene Kepulauan**<br> <br>Bupati saat menyampaikan pandangannya terhadap implementasi RKPD dan Renja SKPD | Pembentukan Forum Gabungan SKPD yang anggotanya terdiri atas SKPD, legislative, dan organisasi masyarakat sipil dalam rangka penyusunan RKPD.<br><br>Bupati pro aktif dalam menilai, mengevaluasi, dan mengkritisi implementasi RKPD dan Renja SKPD. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Renja SKPD | **Kabupaten Pinrang**<br> | Bupati merekomendasikan pembentukan lembaga/unit Pelayanan Satu Atap untuk meningkatkan pelayanan di sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Prasarana dan Sarana Wilayah, Pertanian, Hukum, dan Ketertiban, yang selama ini dinilai lamban dalam melayani kebutuhan publik. |
| 9 | Penyusunan Regulasi Perencanaan | **Kabupaten Enrekang** | Bappeda berinisiatif untuk menyusun regulasi daerah tentang penyusunan perencanaan daerah. |

# KLINIK KONSULTASI TEKNIK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

## KONSULTASI TEKNIK RENSTRA SKPD DAN KECAMATAN DI KAB.BOYOLALI JAWA TENGAH

### I. LATAR BELAKANG

Ada 3 hal yang menjadi latar belakang penyelenggaraan klinik konsultasi di daerah bantuan teknis LGSP Jawa Tengah, khususnya Kab. Boyolali, yaitu :

1. **Regulasi Perencanaan dan Penganggaran baru**
   Dengan diberlakukannya UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta regulasi terkait seperti UU No.32 tahun 2004, UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara serta peraturan-peraturan yang mengikutinya, khususnya Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. **Kesulitan Implementasi di Daerah**
   Daerah dalam hal ini Bappeda, walaupun sudah mensosialisasikan regulasi baru tetapi pemahaman praktis SKPD-SKPD masih belum mampu mendorong SKPD-SKPD dalam mempersiapkan penyusunan dokumen wajib (Renstra SKPD dan Renja SKPD).
3. **Kesulitan Implementasi di SKPD**
   SKPD belum memahami sepenuhnya implementasi regulasi kedalam dokumen perencanaan, khususnya proses integrasi dan partisipasinya, karena disamping cepatnya perubahan regulasi tetapi juga pada umumnya karena keterbatasan waktu dan SDM dari SKPD.

### II. SASARAN DAN TUJUAN

Klinik konsultasi teknik (Technical Advisory) untuk penyusunan Renstra SKPD merupakan tindak lanjut dari training Renstra dan Renja SKPD di Kab.Boyolali. Penyelenggaraan klinik konsultasi teknik dibagi menjadi dua tahap, dimana tahap pertama diadakan pada tanggal 13-14 September 2006 yang ditujukan untuk dinas, badan dan kantor. Sedangkan tahap kedua diadakan pada tanggal 12 Desember 2006 yang dikhususkan untuk kecamatan-kecamatan di Kab.Boyolali.

#### 2.1 SASARAN

Sasaran dari klinik konsultasi teknis ini adalah:

1) Memberikan kesempatan kepada setiap SKPD untuk dapat berkonsultasi secara langsung tentang permasalahan dan hambatan dalam penyusunan dokumen wajib SKP, yaitu salah satunya Renstra SKPD. Dengan demikian konsultasi yang dilakukan bisa lebih focus dan lebih rinci.
2) Memberikan advis yang lebih terarah bagi tersusunnya dokumen perencanaan SKPD yang baik, yaitu dengan fokus kelengkapan isi dokumen, penjabaran dan ketajamam isi, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya – RPJMD - dan proses yang perlu dilakukan.

#### 2.2 TUJUAN

Tujuan dari konsultasi teknis ini adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan SKPD baik dari aspek substansi maupun prosesnya.

**III. PELAKSANAAN**

Klinik konsultasi teknis diselenggarakan oleh LGSP bersama-sama dengan Bappeda Kabupaten dengan melibatkan Service Provider Planning (SP – UNS).

**3.1 PRA DAN PASKA KONSULTASI**

**A.Pra Konsultasi**

*Training*

Training Renstra SKPD diberikan agar semua SKPD mempunyai pemahaman yang sama tentang regulasi, isi dan proses penyusunan dokumen tersebut.

*Persiapan SKPD*

Konsultasi teknis merupakan tindak lanjut dari training Renstra SKPD yang telah diselenggarakan sebelumnya. Dengan demikian konsultasi teknis dilaksanakan dengan asumsi bahwa pasca training semua SKPD telah mendapat bekal teori dan prinsip-prinsip penyusunan Renstra SKPD dan telah melaksanakan penyusunan *draft dokumen perencanaan* sejauh pemahaman yang bisa mereka tangkap selama training.

**B.Paska Konsultasi**

Paska konsultasi diharapkan SKPD melakukan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan hasil konsultasi. Penyempurnaan dapat berupa :

(1) Kelengkapan isi dokumen, yaitu apakah daftar isinya sudah benar dan lengkap. Pada waktu konsultasi banyak dijumpai bermacam-macam daftar isi.

(2) Kesesuaian dan ketajaman isi, yaitu apakah isi setiap bab dan sub-bab sudah sesuai dengan yang dimaksud regulasi dan apakah pembahasannya sudah cukup tajam. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada SKPD-SKPD yang dalam pengisiaannya berprinsip asal mengisi, sehingga secara substansial pembahasannya tidak berbunyi, apalagi kalau dilihat kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya dan sesudahnya.

(3) Proses perumusannya, apa sudah cukup atau masih perlu dikonsultasikan dengan stakeholder lainnya. Banyak diantara SKPD yang menyusun visinya hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, padahal seharusnya merupakan tugas bersama SKPD dan stakeholdernya.

**3.2 KEMITRAAN**

Dalam menyelenggarakan klinik konsultasi teknik LGSP bermitra dengan Bappeda dan Service Provider yang masing-masing berperan sebagai berikut :

1) <u>Bappeda sebagai koordinator penyelenggara</u>
Bappeda sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam perencanaan di daerah merupakan *client* LGSP yang perlu didukung dengan konsep dan pemikiran dalam menjalankan fungsi koordinasi dan advisory. Bappeda dapat bertindak aktif sebagai koordinator penyelenggaraaan konsultasi maupun terlibat aktif dalam pelaksanaan konsultasi.

2) <u>Service-Provider dan LGSP sebagai nara sumber</u>
LGSP dalam melaksanakan tugas bantuan teknis dibantu dengan tenaga ahli local (Jawa Tengah) atau Service Provider yang telah paham tentang konsep bantuan LGSP. Service Provider bertindak aktif dalam memberikan advis-advis teknis dan melakukan pencatatan-pencatatan tentang saran perbaikan yang masih perlu dilakukan oleh SKPD dengan menggunakan *Form Konsultasi*. Service Provider yang dilibatkan untuk melayani konsultasi ini 4 orang, dimana 2 orang diantaranya mempunyai kelebihan pemahaman tentang Keuangan di samping perencanaan strategis.

**3.3 TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Dengan memperhatikan fungsi dan tanggung jawab Bappeda dalam perencanaan di daerah, maka tempat penyelenggaraan klinik konsultasi teknik ditentukan di kantor Bappeda, yaitu dengan menggunakan ruang pertemuan.

**3.4 PESERTA**

Peserta konsultasi teknik di Kab.Boyolali terdiri dari seluruh SKPD dan Kecamatan. Pesertanya terdiri dari 9 Dinas, 8 Badan, 5 Kantor dan 19 Kecamatan. Peserta pada umumnya sudah membawa draft Renstra SKPD.

**3.5 MANAJEMEN WAKTU**

Mengingat banyaknya SKPD dan Kecamatan yang akan dilayani, maka Penyelengaraan klinik konsultasi teknik dilakukan selama 2 hari untuk Dinas, Badan dan Kantor, kemudian 1 hari untuk Kecamatan.

Untuk menghindari penumpukan peserta dan dengan mempertimbangkan jumlah advisor yang akan menempati 4 meja, maka dalam sehari waktu konsultasi dibagi menjadi 3 sesi, yaitu :
Jam 8.00 – 10.00, Jam 10.00 – 12.00, Jam 12.00 – 14.00, yang mana masing-masing sesi melayani 10 SKPD. Dengan demikian setiap SKPD mempunyai kesempatan konsultasi sekitar 50 menit.

**3.6 KONSULTASI**

Dalam menyelenggarakan konsultasi teknis, ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu fokus konsultasi dan mekanisme konsultasi.

**A. Fokus Konsultasi**

Dalam konsultasi harus ada fokus yang perlu dievaluasi agar hasilnya dapat maksimal. Konsultasi yang dilakukan peserta difokuskan pada kebutuhan penyusunan dokumen Renstra SKPD, yaitu meliputi :

1) *Kelengkapan isi dokumen*
   a. Penilaian daftar isi serta urutan pembahasan nya
   b. Penjabaran isi masing-masing bab dan sub-bab

   c. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya RPJMD
2) *Proses Perumusan*
   Dalam perumusan dokumen Renstra SKPD, ada tahap-tahap yang perlu dirumuskan melalui konsultasi dengan stakeholder lainnya, misalnya di dalam merumuskan visi-misi SKPD.

**B. Mekanisme Konsultasi**

Pelaksanaan konsultasi didasarkan pada jadwal yang telah disusun bersama antara LGSP dengan Bappeda. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dicatat :

(1) Apabila ada SKPD yang tidak datang pada waktu yang telah dijadwalkan, maka SKPD tersebut akan kehilangan kesempatan untuk berkonsultasi, karena pada jam-jam selanjutnya akan diisi oleh SKPD lain.
(2) Dalam berkonsultasi, SKPD diwakili oleh tim teknis penyusun Renstra SKPD yang jumlahnya 2 orang atau lebih dari setiap SKPD.
(3) Hasil evaluasi dicatat pada Form-Konsultasi, dimana satu lembar dibawa oleh advisor (Service Provider) dan satu lembar lagi dibawa oleh SKPD bersangkutan. Form ini sebagai pegangan advisor untuk memeriksa perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, disamping bagi SKPD untuk keperluan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.
(4) Peserta berkonsultasi kepada para advisor dimana peserta dapat memilih di antara 4 meja konsultasi
(5) Advisor yang kurang mendalami aspek tertentu, misalnya tentang keuangan, maka peserta akan dirujuk kepada advisor lain yang lebih menguasai.

---

**Keterangan gambar :**
**Suasana konsultasi penyusunan Renstra SKPD di Kab.Boyolali.**

## IV. KESIMPULAN DAN PENDAPAT

Penyelenggaraan klinik konsultasi teknis telah membantu Bappeda dalam membina kualitas perencanaan di daerah, khususnya di tingkat SKPD. Pembinaan ini tentunya perlu dilakukan terus menerus agar dapat mengimbangi cepatnya perubahan regulasi perencanaan. Selama ini konsultasi teknis dilakukan sendiri-sendiri oleh SKPD ke Bappeda apabila SKPD membutuhkan, sehingga dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tidak semua SKPD merasa perlu berkonsultasi dengan Bappeda. Dengan penyelenggaraan konsultasi teknis yang terkoordinir untuk semua SKPD paling tidak telah memberikan dorongan bagi SKPD-SKPD di daerah untuk menyelesaikan dokumen perencanaannya dengan sebaik-baiknya.

Dengan terselenggaranya konsultasi teknis ini ada beberapa catatan penting dari daerah, yang antara lain:

***Pendapat dari Bappeda Kabupaten***

Bagi Bappeda, klinik konsultasi teknis ini telah membantu Bappeda dalam rangka advis teknis kepada SKPD-SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan wajib kepada SKPD-SKPD di daerah. Tahap sosialisasi Undang-Undang No.25 tahun 2004 beserta peraturan-peraturan yang mengikutinya telah dilakukan oleh Bappeda, tetapi dalam implementasi di tingkat SKPD masih banyak kendala.

***Pendapat dari SKPD peserta konsultasi***

Bagi SKPD, secara umum tersirat pendapat bahwa konsultasi teknis ini memberikan manfaat antara lain:

(1) Terpenuhi harapan SKPD untuk berkonsultasi langsung agar bisa membahas permasalahan SKPD secara lebih spesifik.
(2) Pembahasan dan advis bisa lebih rinci dan langsung pada pemecahan persoalan.
(3) Memberikan keyakinan kepada para peserta bahwa pemahaman dalam hal regulasi dan teknis sudah benar.

***Pendapat LGSP (Planning Specialist-CJRO )***

(1) Klinik konsultasi teknik ini dapat diterapkan untuk semua kebutuhan proses perencanaan guna meningkatkan kualitas perencanaan di daerah. Konsultasi teknik tidak harus dilakukan setelah penyusunan keseluruhan dokumen telah selesai, tetapi bisa dilakukan per-bagian, misalnya dalam perumusan visi-misi dan isu strategis.
(2) Dalam Konsultasi teknik kebutuhan advisor ditentukan oleh jenis perencanaan yang akan dikonsultasikan. Misalnya untuk konsultasi penyusunan Renja SKPD perlu dilibatkan Finance and Budgeting specialist.
(3) Idealnya pelaksanaan konsultasi teknis dilayani lebih dari satu advisor agar dapat mengimbangi jumlah SKPD yang dilayani maupun kebutuhan pendalaman aspek-aspek yang diperlukan oleh perencanaan tersebut.
(4) Pelaksanaannya tidak perlu dilakukan serentak untuk semua SKPD atau pada hari yang berurutan, tetapi bisa diatur lebih fleksibel sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesiapan SKPD. Misalnya di Kab.Boyolali pada minggu pertama untuk dinas, badan dan kantor, kemudian minggu berikutnya khusus untuk kecamatan-kecamatan.
(5) Pelaksanaan konsultasi idealnya harus melibatkan peran aktif bidang-bidang di Bappeda, sebab proses tersebut akan tetap dilaksanakan walaupun sudah tidak ada bantuan teknis LGSP, terutama untuk perencanaan tahunan seperti Renja SKPD.
(6) Penjadwalan konsultasi disesuaikan dengan jumlah advisor atau meja konsultasi, sehingga jumlah SKPD yang dilayani dalam tiap sesi akan semakin banyak apabila jumlah advisor diperbanyak. Dengan demikian waktu yang dibutuhkan semakin pendek.

***Konsultasi lanjutan***

Klinik konsultasi teknik penyusunan Renstra SKPD ini dirasa penting oleh daerah, sehingga konsultasi teknik ini akan dilanjutkan untuk penyusunan Renja SKPD 2008. Konsultasi teknik ini akan diadakan pada pertengahan bulan April 2007, yaitu untuk penyempurnaan dokumen Renja SKPD paska Musrenbangda.

**V. FORMAT-FORMAT**

Format-1 PENJADWALAN WAKTU KONSULTASI

**JADWAL KONSULTASI TEKNIK**

**KABUPATEN :** Boyolali…….
**KONSULTASI TENTANG :** Renstra SKPD
**JUMLAH MEJA KONSULTASI :** 4
**TEMPAT :** Ruang Rapat Bappeda Kab.Boyolali
**HARI KE :** 1
**TANGGAL :** 13 – 14 September 2006

| No | WAKTU KONSULTASI | SKPD | No. MEJA KONSULTASI |
|---|---|---|---|
| **I**<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | **8.00 – 10.00** | | |
| **II**<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | **10.00 – 12.00** | | |
| **III**<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | **12.00 – 14.00** | | |

Format-2 FORM KONSULTASI

**FORM KONSULTASI**

SKPD :……..

Konsultasi ke :……

**I. PERMASALAHAN**

| **FOKUS KONSULTASI** | **DESKRIPSI** |
|---|---|
| **1. DAFTAR ISI** | |
| **2. SUBSTANSI**<br><br>**1. Visi – Misi Satker**<br>**2. Isu, Tujuan, Sasaran**<br>**3. Perumusan Strategi**<br>**4. Perumusan Program**<br>**5. Indikator Kinerja**<br>**6. MTEF** | |
| **3. PROSES PERUMUSAN MASING-MASING SUBSTANSI** | |

**I. RENCANA TINDAK LANJUT**

**……, ……., 2006**

**Satker …….** **Mengetahui** **SP LGSP-CJRO**
**LGSP-CJRO**

**(……..)** **(……)** **(……)**

**Sumber:**
**Hartanto, Planning Specialist LGSP Kantor Regional Jawa Tengah**

# CONTOH PENYELENGGARAAN FORUM SKPD PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

**Latar Belakang**

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2008, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/ sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. Ada tiga asas penting yang membuka partisipasi masyarakat dalam rangka Forum SKPD, yaitu:

1. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
2. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
3. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Aceh Besar yang selama ini belum optimal dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan secara partisipatif perlu kiranya untuk dikenalkan Forum Perencanaan Pembangunan lainnya selain Musrenbang ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Dengan adanya Forum ini, pembahasan program/kegiatan yang lebih spesisfik diharapkan akan lebih tepat sasaran.

Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu forum yang akan dijadikan contoh karena komitmen dari Bupati baru dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar khususnya dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif sangat besar. Selain itu, stakeholder lain yang ada di Aceh Besar juga banyak memberikan perhatian pada masalah pendidikan mengingat anggaran pendidikan di Kabupaten Aceh Besar hanya 14% dari total APBD. Oleh karena itulah, Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar ini dilakukan untuk membahas isu-isu, tujuan, strategi, kebijakan, dan prioritas prgram/kegiatan tahun anggaran 2008.

**Tujuan Forum SKPD Pendidikan** ini adalah untuk:

1 Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Pendidikan.
2 Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD Pendidikan.
3 Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan

daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

4 Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD Pendidikan.

**Sasaran Forum SKPD Pendidikan** ini adalah:

- memberikan pemahaman kepada partisipan terkait dengan pentingnya Forum SKPD pendidikan
- memberikan pemahaman kepada partisipan terkait dengan visi dan misi Bupati (implikasi terhadap SKPD Pendidikan)
- memberikan pemahaman tentang issue dan perspektif terkait dengan SKPD Pendidikan
- mengembangkan rumusan yang diperlukan dalam rangka penentuan prioritas program/kegiatan SKPD Pendidikan
- merumuskan pendekatan untuk mereview keberhasilan Renja Dinas Pendidikan tahun lalu, merumuskan apa kelemahan dan keberhasilan, mana program dan kegiatan yang perlu dikembangkan, perlu dihentikan, perlu disesuaikan, dsb

**Keluaran Forum SKPD Pendidikan** ini adalah :

1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD Pendidikan yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan.
3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD Pendidikan yang yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
4. Berita Acara Forum SKPD Pendidikan

**Jadwal Forum SKPD** ini adalah pada 20 Maret 2007, bertempat di SMA Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar dengan penyelenggara Dinas Pendidikan Kab. Aceh Besar.

**Metoda** yang diterapkan dalam Forum SKPD ini adalah workshop. Adapun informasi awal yang disampaikan kepada partisipan yaitu :

- Agenda Forum SKPD Pendidikan
- Handout tata cara penyusunan Renja SKPD Pendidikan
- Petunjuk teknis penyelenggaraan Forum SKPD
- Rancangan Renja SKPD Pendidikan untuk tahun 2008
- Rangkuman tentang isu-isu pendidikan
- Form-form yang terkait dengan penyusunan Renja SKPD

**Stakeholder yang dilibatkan** antara lain adalah:

- dari Pemerintah Daerah: Dinas Pendidikan Kab., Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda Kab., Dinas Syariat Kab., Perwakilan dari Kecamatan, Perwakilan dari Sekolah, Diklat, BRR. (total partisipan 40). Mereka diharapkan dapat memberikan gambaran tentang persoalan Pendidikan Kabupaten Aceh Besar.
- dari non pemerintah: DBE 1, DBE 2, UNICEF, Islamic Relief, ERA, Education Int., Plan Int., Kobar GB, Gerak Aceh Besar, Sorak Aceh Besar, Muhammadiyah, Pugar, Komite Sekolah, MPD, Unsyiah, IAIN, (total partisipan 20). Mereka diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan rumusan yang diperlukan dalam rangka penentuan prioritas program pendidikan
- dari DPRD: Komisi D (total partisipan 2). Mereka diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan rumusan yang diperlukan dalam rangka penentuan prioritas program pendidikan.

**Fasilitator** yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tenaga ahli perencanaan daerah, manajemen daerah, keuangan daerah, dan ahli pengembangan partisipasi masyarakat. Fasilitasi dilakukan dengan menerapkan metoda **Technology of Participation (TOP)**.

**Agenda** kegiatan sebagaimana contoh terlampir.

**Strategi/Langkah** yang dilakukan dalam Forum SKPD ini yaitu :

- pemaparan visi dan misi Bupati (implikasi terhadap SKPD Pendidikan)

- pemaparan tentang evaluasi program/kegiatan tahun 2006
- pemaparan tentang program/kegiatan tahun 2007
- pemaparan tentang rancangan Renja SKPD Pendidikan Tahun 2008
- pemaparan tentang hasil musrenbangcam (khusus isu pendidikan)
- prioritisasi isu dan program/kegiatan SKPD Pendidikan untuk tahun 2008
- penentuan delegasi yang akan mengikuti Musrenbangda

**Tools/Instrumen** yang digunakan stakeholder dalam kegiatan ini adalah Format-format utama dari Permendagri 13/2006 terutama terkait dengan penyusunan Renja SKPD ataupun menggunakan kertas metaplan.

**Naskah kesepakatan** memuat Kesepakatan tentang isu, prioritas program/kegiatan SKPD Pendidikan, dan Daftar delegasi yang akan mengikuti Musrenbangda.

Sumber:
**Susila Utama, Planning Specialist LGSP, Kantor Regional Nanggroe Aceh Darussalam**

**Contoh Agenda Forum SKPD**

**Agenda Konsultasi Perencanaan Daerah**
**Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar**
Peukan Bada, 20 Maret 2007

| Waktu | Agenda | Fasilitator |
|---|---|---|
| **Selasa, 20 Maret 2007** | | |
| 08.30 – 09.00 | Pendaftaran | Panitia |
| 09.00 – 09.15 | Pembacaan Quran | Panitia |
| 0915 – 09.30 | Sambutan dari Dinas Pendidikan | Ka. Dinas Pendidikan |
| 09.30 – 09.45 | Sambutan dan pembukaan acara | Bupati Aceh Besar |
| 09.45 – 09.55 | COFFEE BREAK | |
| 09.55 – 10.05 | Kesepakatan Agenda | Fasilitator |
| 10.05 – 10.20 | Pemaparan Visi dan Misi | Bupati Aceh Besar |
| | (terkait dengan pendidikan) | Fasilitator |
| 10.20 – 10.30 | Tanya Jawab | |
| 10.30 – 11.00 | Pemaparan Evaluasi Renja Tahun 2006 | Dinas Pendidikan |
| | Pemaparan Renja Tahun 2007 | Fasilitator |
| 11.00 – 11.30 | Diskusi | |
| 11.30 – 12.00 | Pemaparan Rancangan Renja Tahun 2008 | Dinas Pendidikan |
| | Pemaparan hasil Musrenbang Kecamatan | Fasilitator |
| 12.00 – 12.45 | Diskusi | |
| 12.45 – 14.00 | ISHOMA | |
| 14.00 – 15.30 | Prioritisasi Isu, Program/Kegiatan | Dinas Pendidkan |
| 15.30 – 15.45 | Penentuan Delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kabupaten | Fasilitator |
| 15.45 – 16.00 | Penutupan | Ka. Dinas Pendidikan |

*Sumber: Format Konsultasi Perencanaan Daerah untuk Forum SKPD Pendidikan Kabupaten Aceh Besar*